

PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN MELALUI PROGRAM EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN ERIS KABUPATEN MINAHASA

Lefrand Pasuhuk*

Fakultas Ekonomi, Universitas Klabat

Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi nelayan khususnya pada Kecamatan Eris, dipandang perlunya kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab-akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, mencoba menerobos dan mendalami gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Selain berorientasi pada proses juga bertujuan untuk mendeskripsikan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Eris yang kompleks dan tidak bertujuan membuat hipotesa serta hubungan antar variabel, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam tipe penelitian deskriptif.

Keywords: *ekonomi, usaha, nelayan, pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu dalam membangun wilayah pesisir dan lautan menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung menuju kearah yang tidak berkelanjutan. Masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir, sering kali tersisih dari pembangunan sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus kepada sektor pertanian atau daratan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Dibandingkan nelayan di negara tetangga seperti Malaysia, Jepang dan lainnya, nelayan Indonesia umumnya memanfaatkan hasil laut adalah untuk bertahan hidup, lebih khusus masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.

Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi nelayan khususnya pada Kecamatan Eris dipandang perlunya kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan (Kusnadi, 2003). Selanjutnya Kusnadi juga menjelaskan tujuan dari pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata dan kedepannya mobilitas vertikal nelayan

*alamat korespondensi:
lefrand_pasuhuk@yahoo.com

dapat diraih secara bertahap. Proses pemberdayaan ini menganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.

Sejalan dengan pendapat diatas, konteks seperti pemberdayaan komunitas nelayan khususnya komunitas nelayan miskin menjadi penting dalam upaya penyadaran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Stewart dalam Badaruddin et al. (2005, hal. 25) mengemukakan pemberdayaan merupakan gerakan *cultural* (budaya) melalui penyadaran akan kesejahteraannya. Selanjutnya Stewart menjelaskan individu bukanlah objek, melainkan berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan melalui pemberdayaan (*empowering*). Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini telah berjalan sejak tahun 2001, dimana tujuan dari program ini adalah penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal dari masyarakat yang berbentuk *social capital* (modal sosial) seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan sumberdaya dan perikanan, permukiman dan infrastruktur.

Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi nelayan khususnya pada Kecamatan Eris, dipandang ”perlunya kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan” (Kusnadi, 2003, hal. 10). Selanjutnya Kusnadi juga menjelaskan

tujuan dari pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata dan kedepannya mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Proses pemberdayaan ini menganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan. Sejalan dengan pendapat diatas, konteks seperti pemberdayaan komunitas nelayan, khususnya komunitas nelayan miskin menjadi penting dalam upaya penyadaran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Stewart dalam Badaruddin et al. (2005, hal. 25) mengemukakan, pemberdayaan merupakan gerakan *cultural* (budaya) melalui penyadaran akan kesejahteraannya. Selanjutnya Stewart menjelaskan individu bukanlah objek, melainkan berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya”. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan melalui pemberdayaan (*empowering*). Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini telah berjalan sejak tahun 2001, dimana tujuan dari program ini adalah penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal dari masyarakat yang berbentuk *social capital* (modal sosial) seperti pendidikan, kesehatan, agama,

lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan, permukiman dan infrakstruktur.

Disamping itu kegagalan program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia lebih berorientasi pada target group pembangunan dan tidak memperhatikan kelanjutan program, proses pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia serta pelembagaan pembangunan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan hasil, manfaat dan dampak pelaksanaan Program PEMP, dan untuk mengetahui pencapaian sasaran dan tujuan, sebab keberhasilan atau kegagalannya, serta berbagai jenis manfaat yang ditimbulkannya. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan, ketidakberhasilan dapat sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) atau penyesuaian (*adjustment*) yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan program dengan kebijakan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di wilayah Kecamatan Eris?

Di dalam studi ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab-akibat sesuatu, tetapi lebihberupaya memahami situasi tertentu, mencoba menerobos dan mendalami gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. (Moleong dalam Sanusi, 2004, hal. 33).

Selain berorientasi pada proses juga bertujuan untuk mendiskripsikan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Eris yang kompleks dan tidak bertujuan membuat hipotesa serta hubungan antar variabel, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam tipe penelitian deskriptif. Bertitik tolak dari penjabaran tersebut, maka penulis memilih informan dari: Staf Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Minahasa. Pengurus/Manajer/Pengelola kegiatan program PEMP di Kecamatan Eris. Masyarakat Pesisir di Kecamatan Eris

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat dan relevan. Dalam usaha pengumpulan data yang valid maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Wawancara; 2. Dokumentasi; 3. Studi pustaka; dan 4. Observasi non-partisipan. Sedangkan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002, hal. 103). Data yang diperoleh dari penelitian dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisa terhadap data tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis data berproses secara induktif dikarenakan beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, analisis induktif dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar yang lain. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama

yang mempertajam hubungan-hubungan dan dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Moleong, 2002, hal. 5).

Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2008, hal. 246) menyatakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*".

HASIL PENELITIAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan upaya untuk menjawab permasalahan diatas. Melalui program PEMP masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2004 tentang pedoman umum pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), oleh pemerintah dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi potensi sumber daya, penguasaan teknologi serta kemampuan berusaha termasuk di dalamnya dukungan moral dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir, merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini diharapkan dapat dibangun suatu kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhatikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan. Dengan langkah ini diharapkan tidak saja akan meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya dan pesisir, tetapi juga akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan kesejahteraan dan sumber daya pesisir dan laut.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Program PEMP mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1999 dalam bentuk *pilot project* di tiga lokasi, yaitu Cilacap, Banggai, dan Batam. Pada tahun anggaran 2000, pelaksanaan program PEMP dilanjutkan di 26 kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi penting untuk meningkatkan IPTEK dan IMTAQ serta sikap dan perilaku. Aspek lingkungan penting untuk kelestarian sumber daya pesisir dan laut serta pemukiman. Aspek infrastruktur dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Keempat aspek ini harus ditunjang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (ekonomi) akan mempengaruhi oleh kegiatan usaha yang dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada, teknologi yang tersedia serta SDM yang akan mengelolakualitas sumber daya yang dicirikan oleh perilaku IMTAQ serta

wawasan IPTEK, kondisi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhartikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya. Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi peran pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah dan, akses modal dan pasar dan tata ruang kawasan pesisir.

Keberhasilan program PEMP harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhartikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi. Pengembangan organisasi dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis pada budaya lokal perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi yang dikembangkan. Hal ini penting terutama untuk membantu mengantisipasi dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran, maka evaluasi dilakukan menggunakan analisa kerangka logis (*logical framework analysis*) yang terdiri dari *indikator* masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sehingga mendapat potret secara keseluruhan.

POTRET INPUT/MASUKAN

Berdasarkan temuan lapangan, potret Input dalam penelitian ini sosialisasi program, dana dan SDM (sumber daya manusia).

Sosialisasi Program. Upaya keberhasilan program diawali dengan sosialisasi program pada semua pihak terkait yang meliputi dinas teknis, masyarakat

sasaran program, tokoh masyarakat dan lainnya guna mendapatkan respon dan masukan untuk penyempurnaan program yang telah disusun. Pada kondisi sosial (tingkat pendidikan dan mental), masyarakat pesisir belum memadai. Di sisi lain program dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan sangat diperlukan tenaga pendamping profesional, monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar program dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pendekatan program yang digunakan adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya, keswadayaan (kemandirian) dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya, kemitraan antara masyarakat aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kegiatan.

Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, KSU LEEP M3 BSM sebagai lembaga yang profesional, maka perangkat kelembagaan, pula kerja, kualitas pendamping, operasioal dan seluruh aspek dalam kegiatan ekonomi yang biayai harus berperan aktif. Pengelolaan keuangan harus dapat transparan dan pembukuan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsi program. Maka sumberdaya pengurus kelembagaapun harus orang-orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan serta komitmen untuk mengembangkan sosial ekonomi para masyarakat pesisir.

Dana. Mengingat jumlah dana yang tersedia sangat terbatas dan jumlah masyarakat pesisir yang ada banyak, semestinya lebih mementingkan efektifitas dan produktivitas untuk mencapai tujuan program daripada mementingkan pemerataan sasaran. Ke depannya juga diperlukan keaktifan dari dinas kelautan dan perikanan pusat maupun kota Manado untuk kembali mengucurkan dan PEMP untuk memperkuat pelaksanaan program.

Di sisi lain, pentingnya konsistensi indikator penentuan masyarakat yang mendapat bantuan modal usaha, agar tidak menimbulkan masalah baru dengan adanya program seperti kecemburuan sosial dengan

masyarakat pesisir lainnya. Hal ini penting Kecamatan Eris tidak semua bermata pencaharian sebagai nelayan atau petambak.

POTRET *OUTPUT*/KELUARAN

Potret *Output* dari hasil temuan lapangan terdiri dari ketertarikan masyarakat pesisir ikut program dan kelembagaan kegiatan.

Tertarik Ikut Program. Masyarakat pesisir kesulitan dalam mengakses modal karena lembagalembaga yang ada sekarang kurang berperan aktif membantu masyarakat pesisir. Penggunaan sistem jaminan dirasakan menyulitkan masyarakat karena mereka kesulitan menyediakan jaminan untuk pengajuan kredit. Manfaat pendirian Swamitra Mina adalah diarahkan untuk mendorong masyarakat pesisir untuk mengembangkan kemitraan dengan kelembagaan swasta dan pemerintah.

Hal ini malah membuat masyarakat pesisir semakin jauh dari makna pemberdayaan karena hanya orang-orang yang mampu secara ekonomi dapat mengakses kredit. Harapan yang ingin dicapai dengan penggunaan perguliran kredit menggunakan jaminan yang diterima berakibat masyarakat dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu dan mandiri. Tetapi malah masyarakat kesulitan untuk mandiri.

Kelembagaan Kegiatan. Hal yang diperoleh dengan pengembangan kelembagaan yaitu kesempatan untuk memperoleh pengelolaan keuangan dan pembinaan kegiatan usaha serta ketidak tergantungan pada lembaga non formal (tengkulak) dan biaya yang harus dikeluarkan nelayan, maka nelayan akan mau mengulang untuk melakukannya.

Menurut Dahuri (2001, hal. 267), pengembangan tersebut karena adanya pengorganisasian dan pengembangan kelembagaan yaitu pertama, peningkatan kemampuan pengurus lembaga dan mobilitas untuk bekerja pada lembaga. Kedua, menyediakan fasilitas ruang pertemuan, peralatan dan bahan lainnya untuk mengoperasikan kegiatan lembaga. Ketiga, adalah penyediaan dan operasional

karena penduduk yang ada pada wilayah dan pemeliharaan serta pengembangan untuk membiayai kegiatan lembaga.

Diharapkan dengan adanya Mitra Nelayan keterbatasan masyarakat pesisir dalam mengakses permodalan dapat diatasi. Ke depannya dengan kemudahan yang diberikan oleh Mitra Nelayan untuk masyarakat pesisir memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan, penjualan, pemasaran serta produksi. Oleh karena itu, perhatian terhadap kedudukan dan fungsi lembaga ekonomi sangat penting pada kehidupan masyarakat pesisir.

POTRET *OUTCOMES*/HASIL

Potret *Output* dari hasil temuan lapangan digambarkan dengan penilaian masyarakat.

Penilaian Masyarakat. Pada awal pendiriannya KSU LEPP M3 BSM masih terbentur oleh kultur yang ada dimasyarakat. Menurut Badarudin (2005, hal. 28) “Kegagalan KUD (Koperasi Unit Desa) juga disebabkan oknum-oknum pengurus yang tidak transparan terhadap keuangan (persoalan moralitas), sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menjadi hilang. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi kecewa terhadap keberadaan koperasi”. Selanjutnya kondisi ini menurut Soetrisna dalam Arif Nasution (2005, hal. 38) “Hal ini disebut dengan istilah ‘trauma katalistik koperasi’ yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan keengganan mereka untuk mengembangkan koperasi karena mereka pernah mengalami suatu kejadian yang sangat tidak menggembarakan terhadap koperasi”.

Unit usaha Mitra Nelayan yang merupakan kerjasama dengan Bank Mandiri berdasarkan penilaian masyarakat telah memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit. Masyarakat juga semakin berani mengajukan kredit tetapi masyarakat juga keberatan dengan adanya jaminan dalam pengajuan kredit. Kerjasama ini kedepannya perlu dikembangkan lagi dengan catatan sistem jaminan yang diperlakukan di tinjau ulang dengan harapan semakin

memudahkan masyarakat pesisir untuk mengakses kredit secara mudah.

POTRET *BENEFIT*/MANFAAT

Potret *benefit* digambarkan dengan manfaat unit usaha dan kebutuhan alat terpenuhi.

Manfaat Unit Usaha. Apabila melihat prinsip pada program PEMP kegiatan Mitra Nelayan diharapkan adanya *competitiveness* yang diharapkan nasabah maupun debitur dapat bersaing secara jujur dalam mengajukan usulan pinjaman kredit kepada Mitra Nelayan, sehingga usaha-usaha yang baik dan mampu saja yang bisa mendapatkan kredit. Selain kelompok masyarakat pesisir kelompok-kelompok lain yang tidak berusaha di bidang perikanan juga bisa mengajukan kredit. Seperti terlihat pada tabel diatas Mitra Nelayan juga memberikan kepada masyarakat golongan lain, malah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini terlihat bahwa Mitra Nelayan memberi kesempatan yang sama kepada kelompok lain agar memperoleh dan merasakan manfaatnya secara langsung, jadi prinsip dalam program PEMP yaitu *Equality* telah dijalankan oleh Mitra Nelayan.

Seperti yang diketahui kemiskinan pada masyarakat pesisir bukan hanya terjadi karena akses permodalan yang kurang, tetapi permasalahan yang bersifat teknis juga menjadi masalah. Seperti contoh kemampuan dalam memasarkan produk dengan harga yang menguntungkan masih lemah, yang berakibat sumber pendapatan nelayan menjadi kurang karena tidak memiliki sarana pemasaran yang baik. Selain itu juga efek sampingnya ketika pendapatan nelayan kurang mereka terpaksa menghutang di sana-sini yang berakibat juga terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Kebutuhan Alat Terpenuhi.

Penggunaan teknologi penangkapan yang modern tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya perikanan memang harus diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat

pesisir secara maksimal. Tersedianya peralatan dan perlengkapan tangkap ini dapat menghilangkan atau mengurangi pengaruh dari faktor-faktor penyebab kemiskinan. Apabila faktor peralatan yang semakin mudah didapatkan diharapkan dapat membantu pendapatan nelayan yang pada gilirannya nelayan akan giat dalam berusaha.

Dulunya mereka melaut hanya menggunakan dan mengandalkan pancing sederhana atau kapal kecil, maka setelah mendapatkan kemudahan peralatan tangkap pola berusaha mereka telah berupa yang membuka peluang perbaikan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonominya.

POTRET *IMPACT*/DAMPAK

Berdasarkan temuan lapangan, potret *impact* yaitu penguatan kelembagaan dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.

Penguatan Kelembagaan.

Pengembangan koperasi ini sebenarnya juga menjadi tujuan dari program PEMP itu sendiri melalui peningkatan kemandirian masyarakat yang dilakukan melalui sarana unit-unit usaha dari koperasi. Pengembangan koperasi ini diharapkan dapat menghimpun dan dikembangkan potensi dari kreasi, tanggungjawab kolektif, prinsip swadaya dan sumber daya yang dimiliki masyarakat pesisir. Pengembangan kelembagaan pada koperasi ini yang perlu ditingkatkan adalah sumberdaya manusia terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian dan kordinasi. Kekuatan kelembagaan sudah disahkan sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program seperti pembinaan dan pengawasan yang diterapkan dalam program PEMP.

Perekonomian Masyarakat

Meningkat. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri

keberhasilannya akan oleh kondisi sumber yang tersedia, serta kualitas SDM yang akan mengelolanya kualitas sumberdaya manusia, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhartikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya.

Pada pelaksanaannya program PEMP menurut masyarakat masih belum membantu mereka. Pendapatan mereka masih jauh dari harapan mereka, hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan program PEMP kurang berperan aktif. Koperasi yang seharusnya memberikan pengetahuan dan keterampilan biasanya hanya memberi kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengikutinya dan seperti yang kita ketahui persentase jumlah anggota koperasi jauh dari jumlah keseluruhan masyarakat pesisir Kecamatan Tugu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Input program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Eris antara lain sosialisasi dan dana dirasakan kurang mendukung pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi selama ini tidak memberikan informasi sehingga masyarakat kurang memahami program. Pendanaan program yang selama ini berasal dari pemerintah masih jauh dari harapan. Sedangkan sumber daya manusia pelaksana program PEMP sudah sesuai karena merupakan orang-orang sekitar dan sudah paham kondisi wilayahnya.

Output program PEMP adalah ketertarikan ikut program karena masyarakat pesisir ingin meningkatkan hasil tangkapan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan lembaga keuangan mikro swamitra yang memberikan akses kredit kepada masyarakat. Tetapi dengan adanya sistem kredit menggunakan jaminan menyulitkan masyarakat untuk mengakses

daya laut dan pesisir yang ada, teknologi kredit. Secara kelembagaan program PEMP sudah sesuai dengan perencanaan, hal ini terlihat dari peningkatan-peningkatan kelembagaan itu sendiri.

Outcomes program PEMP adalah penilaian masyarakat terhadap koperasi dan unit usaha masih dianggap kurang bermanfaat, mereka takut akan keberlangsungan koperasi. Ketakutan masyarakat juga karena adanya ketakutan untuk berhubungan dengan pihak perbankan. Hal ini juga ditambah dengan adanya jaminan untuk mengambil kredit.

Benefit program PEMP berdasarkan pengamatan kurang memberi hasil kepada masyarakat. Kelompok-kelompok yang dibentuk hanya merupakan instrumen untuk mendapatkan modal. Kegiatan pendampingan yang seharusnya dilakukan oleh kelembagaan yang telah dibentuk tidak optimal. Sedangkan kebutuhan alat yang merupakan kebutuhan utama masyarakat nelayan belum bisa dipenuhi oleh kedai pesisir.

Impact program PEMP adalah penguatan kelembagaan masih dirasakan kurang berkembang. Ketidakberhasilan ini juga disebabkan kurang aktifnya partisipasi masyarakat akibat syarat keanggotaan yang memberatkan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

SARAN

Setelah melakukan penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Agar pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dapat berjalan mendukung keberhasilan dapat dimulai dengan sosialisasi yang tidak hanya tingkat kecamatan tapi sampai kelurahan-kelurahan.

Untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap program PEMP kedepan lembaga swamitra harus lebih aktif lagi menggulirkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Perguliran kredit juga diupayakan kepada masyarakat yang secara

ekonomi lemah tetapi usahanya berkembang baik dengan cara menghilangkan jaminan.

Ke depannya agar penilaian masyarakat terhadap program PEMP berkembang persyaratan untuk mengakses akses kredit yang masih dirasa menyulitkan masyarakat perlu dihilangkan untuk mengurangi ketakutan masyarakat akan lembaga keuangan. Kerjasama dengan Bank Mandiri perlu ditinjau ulang dimana kedepan diupayakan untuk memberikan kemudahan jaminan untuk mengambil kredit.

Untuk meningkatkan manfaat program PEMP seharusnya kelembagaan yang sudah dibentuk harus lebih aktif dalam memberikan pendampingan. Kelembagaan yang ada juga diharapkan bisa memberikan akses penjualan hasil tangkapan maupun tambak kepada pihak lain untuk membantu peningkatan penjualan dan produksi tangkapan dan tambak.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kedepannya persyaratan menjadi anggota koperasi dikurangi untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu. Ke depannya juga agar koperasi dapat mengadakan pelatihan dan seminar bagi semua masyarakat tanpa memandang anggota maupun bukan anggota koperasi. Diharapkan dengan peningkatan keterampilan masyarakat akan juga memberikan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir sehingga pemberdayaan yang diharapkan program PEMP dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, A. (1995). *Pembangunan dan pemberdayaan*. PAU, SE-FE, UGM, dan BPFE.

Badaruddin, et al. (2005). *Isu-isu kelautan: dari kemiskinan hingga bajak laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badjuri, A., & Teguh, Y. (2002). *Kebijakan publik konsep dan strategi*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisa kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fauzi, A. (2005). *Kebijakan perikanan dan kelautan: isu, sintesis dan gagasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sutrisno, H. (1993). *Metodologi research jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kusnadi. (2006). *Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir*. Bandung: Humaniora.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2002). *Modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta.

Modul Dewan Riset (MDR) JATENG. (2002). DPRD JATENG.

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja.

Rosda, K. (2005). *Pedoman umum pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir (PEMP)*. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Profil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Dinas Kelautan dan Perikanan. Kota Semarang. Semarang Dalam Angka. (2005). BPSJATENG.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sugiyono. (2001). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Wrihatnolo, R. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Warsito, H. (1997). *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.